

2025

Minggu ke-2 November
(10 s.d. 16 November 2025)

Isu Sepekan

Bidang Ekuinbang, Komisi VI



BADAN KEAHLIAN
DPR RI

Bridging research to parliament
Evidence based policy making

KENAIKAN HARGA BAHAN POKOK MENJELANG NATAL DAN TAHUN BARU

Yosua Pardamean Samuel
Analis Legislatif Ahli Pertama
yosua.samuel@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menjelang periode Natal dan tahun baru (nataru) tahun 2025/2026, Indonesia kembali menghadapi kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang mulai terlihat sejak awal November. harga pada komoditas penting seperti beras, cabai, bawang merah, dan daging sapi di berbagai daerah menunjukkan adanya peningkatan. Kondisi perkembangan harga, sebagai contoh di Provinsi Jawa Timur, terjadi kenaikan harga yang cukup tajam pada cabai, bawang, dan daging, sementara di wilayah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, hal serupa juga terlihat terutama pada beras dan sayur-sayuran. Kejadian ini mengindikasikan bahwa gejolak harga terjadi secara lebih luas dan tidak hanya terbatas pada wilayah perkotaan atau pusat perdagangan besar.

Salah satu permasalahan utama yang terjadi dari keadaan ini adalah adanya potensi penurunan daya beli masyarakat. Akhir tahun merupakan periode ketika konsumsi rumah tangga meningkat karena kebutuhan perayaan keagamaan, peningkatan aktivitas perjalanan, dan kenaikan permintaan terhadap bahan pangan. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah, kenaikan harga sedikit saja pada komoditas pokok dapat berdampak signifikan karena peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat memperburuk tekanan ekonomi rumah tangga, menurunkan daya beli, dan memperluas risiko kerentanan sosial di sejumlah daerah.

Permasalahan berikutnya terkait dengan ketidakstabilan pasokan. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan berbagai langkah stabilisasi, seperti memperkuat distribusi beras melalui bulog dan meningkatkan frekuensi operasi pasar di berbagai wilayah, efektivitas intervensi tersebut tidak selalu merata. Faktor-faktor seperti cuaca ekstrem yang mengganggu produksi pertanian, keterbatasan stok komoditas tertentu, dan tingginya biaya logistik antarwilayah sering kali menyebabkan distribusi pangan tidak sepenuhnya lancar. Kondisi ini membuat beberapa daerah mengalami lonjakan harga lebih cepat dibandingkan daerah lainnya, sehingga memunculkan perbedaan harga antarwilayah yang tidak kecil.

Di sisi lain, pola musiman menjelang nataru juga menambah tekanan pada harga. Peningkatan permintaan yang terjadi secara bersamaan di banyak wilayah menciptakan kompetisi pasokan di tingkat distribusi. Disparitas antara sentra produksi dan pasar tujuan yang tidak diimbangi dengan kelancaran logistik dapat memperburuk situasi. Komoditas yang sangat sensitif terhadap perubahan cuaca, seperti cabai dan bawang, kerap mengalami fluktuasi harga yang tinggi pada penghujung tahun karena tingkat produksinya menurun, sementara permintaan cenderung meningkat.

Kejadian kenaikan harga bahan pokok ini juga dapat berimplikasi terhadap inflasi pangan secara nasional. Jika gejolak harga meluas dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, stabilitas inflasi dapat terganggu pada awal tahun 2026. Hal ini berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, kestabilan pasar lokal, dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pengendalian harga oleh pemerintah.

2025

Minggu ke-2 November
(10 s.d. 16 November 2025)

Isu Sepekan

Bidang EKKUINBANG, Komisi VI

Untuk menyelesaikan permasalahan kenaikan harga bahan pokok, diperlukan rangkaian tindakan yang cepat dan terfokus. *Pertama*, efektivitas operasi pasar perlu ditingkatkan di wilayah yang menunjukkan lonjakan harga paling tinggi agar tekanan harga dapat segera mereda. *Kedua*, distribusi komoditas strategis khususnya beras perlu dipercepat menuju pasar tradisional sehingga ketersediaan tetap stabil dan tidak terjadi kekosongan pasokan. *Ketiga*, mekanisme pemantauan harga harian perlu diperkuat melalui sistem yang memungkinkan deteksi dini dan penanganan segera ketika terjadi kenaikan harga yang tidak wajar. *Keempat*, perbaikan pada aspek logistik, termasuk pemberian insentif bagi transportasi distribusi, dibutuhkan untuk memastikan komoditas dapat menjangkau wilayah-wilayah dengan akses terbatas. *Kelima*, bantuan sementara seperti subsidi harga atau bantuan tunai perlu disalurkan kepada kelompok rentan guna menjaga daya beli mereka selama periode kenaikan harga berlangsung. Dengan kombinasi intervensi pasokan, penguatan distribusi, serta pelindungan sosial yang tepat Sasaran, kenaikan harga bahan pokok menjelang nataru dapat direddam sehingga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Atensi DPR

Kenaikan harga bahan pokok menjelang nataru menjadi isu yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan meningkatkan tekanan inflasi pangan. Lonjakan harga beras, cabai, bawang, daging, serta komoditas strategis lainnya menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan, sekaligus mengindikasikan belum optimalnya pengendalian harga di tingkat distribusi. Jika tidak direspon cepat, kondisi ini dapat memperburuk beban ekonomi rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Dalam menghadapi persoalan ini, Komisi VI DPR RI perlu mengambil langkah pengawasan yang lebih intensif terhadap Kementerian Perdagangan dan pelaku usaha lainnya untuk memastikan ketersediaan barang dan kestabilan harga di pasar. Evaluasi terhadap efektivitas operasi pasar, kelancaran rantai pasok, dan potensi hambatan logistik harus dilakukan secara menyeluruh. Melalui penguatan fungsi pengawasan dan penyesuaian kebijakan yang responsif dapat membantu menjaga stabilitas harga dari kebutuhan pokok. Hal diperlukan agar` kebutuhan masyarakat terlindungi selama periode nataru.

Sumber

cnnindonesia.com, 14 November 2025;
detik.com, 15 November 2025;
rrri.co.id, 12 November 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Julia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making

©PusakaBK2025